

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah kesejahteraan masyarakat merupakan suatu fenomena yang sering menjadi sorotan bagi pemerintah. Dengan bertambahnya populasi jumlah penduduk di wilayah perkotaan dapat menjadi salah satu penyebab suatu wilayah menjadi padat dan kurang tertata. Pada tahun 2035 diperkirakan 66,6% penduduk akan tinggal di Kota. Peningkatan penduduk tersebut juga berpengaruh terhadap peningkatan kawasan kumuh di perkotaan. Total luas kawasan kumuh nasional pada tahun 2019 adalah 87.000 hektar, terdiri dari 23.473 hektar. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan bahwa diantara 64,1 juta rumah, sekitar 9,12% rumah tangga berada dalam kondisi perumahan yang tidak layak huni, dan hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki 38.431 hektar kawasan kumuh perkotaan.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28H ayat 1 menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ayat tersebut menunjukkan bahwa bertempat tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang sehat dan layak merupakan hak dasar bagi masyarakat yang harus menjamin hak tersebut adalah pemerintah yang sebagai Penyelenggara Negara. Serta Undang-Undang No 01 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan

permukiman, bahwa penanganan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah Daerah dan atau setiap orang.

Oleh karena itu pemerintah melakukan upaya dalam menangani permukiman kumuh, yaitu dengan membuat Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Hal tersebut tertulis dalam Surat Edaran Kementerian PUPR No. 40/SE/DC/2016 tentang pedoman umum program KOTAKU. Program KOTAKU ini merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dengan mendukung gerakan 100-0-100 yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, 100 persen akses sanitasi layak. Program KOTAKU adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 provinsi.

Kota Cirebon menjadi salah satu yang melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Berbagai upaya yang terus dilakukan Pemerintah Kota Cirebon dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Cirebon agar lebih baik untuk kedepannya. Disadari bahwa kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berkaitan erat dengan masyarakat dan sebagai implementasi dari prinsip bahwa pembangunan yang dilakukan termasuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh tidak boleh merugikan masyarakat, maka dalam pelaksanaan program KOTAKU selalu menerapkan penapisan lingkungan dan sosial.

Program KOTAKU merupakan program pengentasan kawasan kumuh di Kota Cirebon salah satunya di Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Penataan dilakukan di RW 01, RW 07 dan RW 10. Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon SK : Nomor : 663/KEP.133-DPRKP/2018, luas kawasan kumuh di Kota Cirebon mencapai 315,91 Ha, sedangkan luas kawasan kumuh di Kelurahan Panjunan yaitu 17,72 Ha. Di samping itu, tidak semua kawasan kumuh yang ada di Kota Cirebon masuk dalam kegiatan Program KOTAKU.

Dalam tujuan program KOTAKU yaitu meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh sesuai dengan kriteria kumuh yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yang membuat pelaksanaan program tersebut menjadi terhambat dan tidak sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, mendasari perlunya adanya penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh di Kota Cirebon”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut : “Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh di Kota Cirebon belum optimal.”

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini terdapat beberapa identifikasi masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana implementasi kebijakan program kota tanpa kumuh di kota cirebon?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program kota tanpa kumuh di Kota Cirebon?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ditemui pada implementasi kebijakan program kota tanpa kumuh di Kota Cirebon?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan penulisan yang hendak dicapai adalah :

1. Mengetahui Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Cirebon.
2. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Cirebon.
3. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ditemui dalam Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Cirebon.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Secara Teoritis

Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama perkuliahan dalam penerapannya secara nyata. Memberikan pengetahuan yang lebih tentang Ilmu Administrasi Publik, diharapkan akan menjadi bahan bacaan keilmuan kebijakan publik khususnya pada pelaksanaan program kota tanpa kumuh.

1.5.2 Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan atau sumber informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan program kota tanpa kumuh. Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan dan gambaran bagi kalangan akademisi dan para pelaku (stakeholder) yang terlibat pada pelaksanaan program kota tanpa kumuh.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Suatu Kebijakan akan terlihat manfaatnya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut.

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano (Harbani pasolong 2016: 38) mengatakan bahwa:

“Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.”

Menurut William N. Dunn 1994 (Harbani pasolong 2016: 38), mengatakan bahwa :

“Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.”

Menurut Chaizi Nasucha (Harbani pasolong 2016: 38), mengatakan bahwa:

“Kebijakan Publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hokum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika social dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan social yang harmonis.”

“Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.” (Leo Agustino 2020: 144)

“Implementasi kebijakan, secara sederhana berarti pelaksanaan sebuah kebijakan tersebut dari sesuatu yang normatif dan pasif menjadi sesuatu yang aktif, aktual atau fungsional. Oleh karena itu tahapan implementasi kebijakan sering disebut sebagai salah satu tahapan yang paling krusial dalam keseluruhan proses kebijakan jika dikaitkan dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.” (Daradjat kartawidjaja 2018: 76)

A. Mazmanian dan P.A Sabatier (Dewi, 2016:154), mengemukakan bahwa :

“Implementasi adalah apa yang sesungguhnya terjadi sesudah program dinyatakan terlaksana atau direncanakan merupakan faktor perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian dan kegiatan yang muncul setelah diberlakukannya pedoman kebijakan Negara yang mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak atau akibat kepada masyarakat atau kegiatan dan program yang sedang atau akan dilakukan.”

Lineberry (Fadillah, 2003:81) yang mengatakan :

“Implementasi merupakan suatu tindakan yang diimplementasikan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu dan kelompok yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.”

Sedangkan menurut Grindle (Mulyadi, 2016:47) menyatakan :

Proses implementasi dapat dilaksanakan jika sasaran dan tujuan sudah disahkan, program kegiatan sudah terorganisir dan dana program sudah siap dan telah disalurkan untuk mencapai tujuan.

“Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar suatu kebijakan dapat tercapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua cara yang bisa dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.” (Nugroho, 2003:158)

“Proses implementasi kebijakan menjelaskan bahwa kebijakan dioperasionalkan dalam bentuk program. Kemudian program tersebut diturunkan menjadi proyek yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan. Kegiatan tersebut ditujukan kepada pemanfaat program, yang mana pemanfaat program adalah masyarakat.” (Nugroho, 2003:159)

Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2008:152) mengemukakan implementasi kebijakan sebagai aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi publik yang diarahkan guna mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

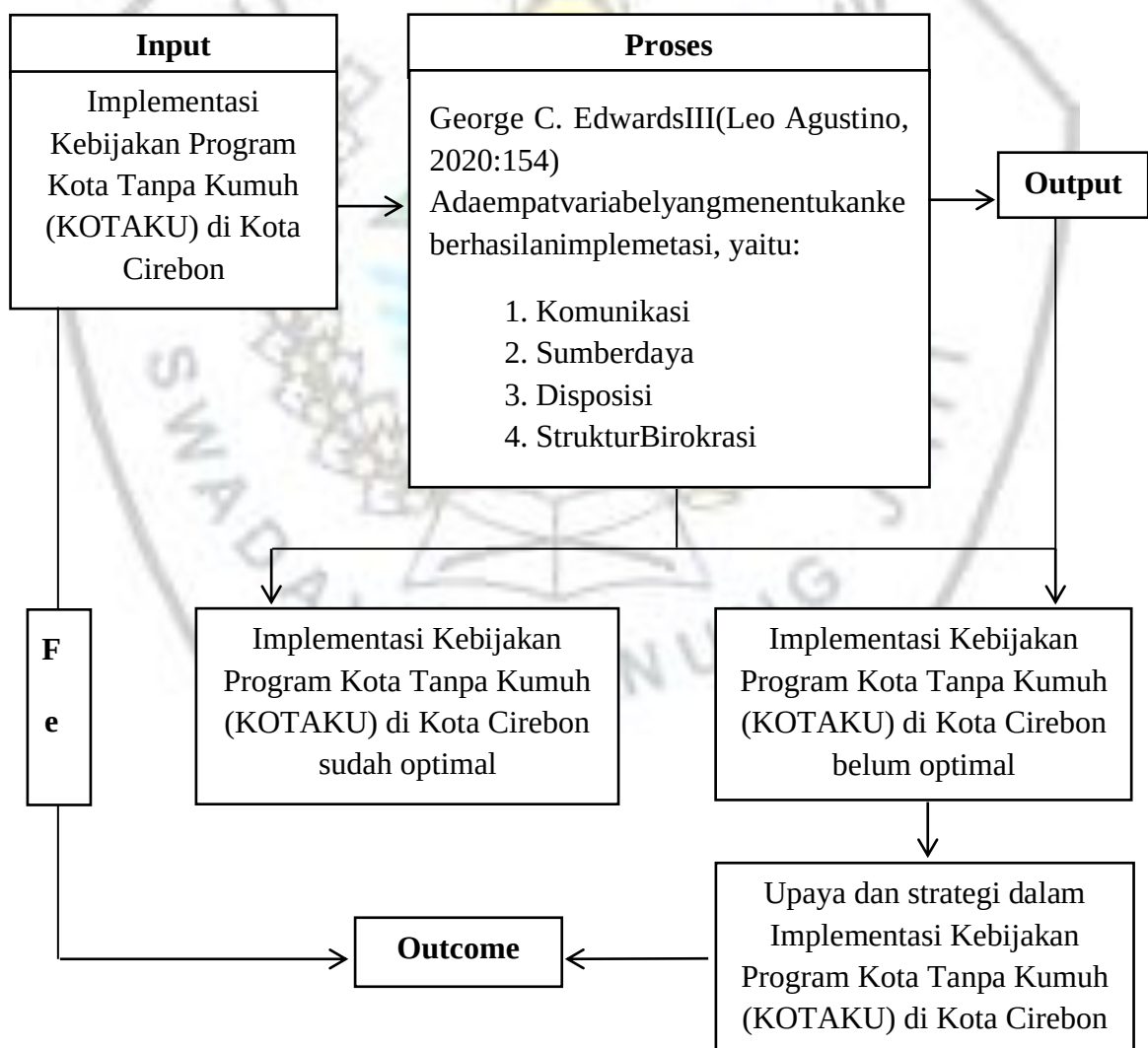
Implementasi kebijakan menurut Udoji (dalam Leo Agustino, 2016:129) menegaskan bahwa:

“Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada formulasi kebijakan. kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak dilaksanakan.”

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan proses yang melaksanakan suatu keputusan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau swasta baik kelompok atau individu dalam pencapaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur inilah suatu masalah public dapat diselesaikan atau tidak.

Dalam rangka menjalankan implementasi kebijakan publik, maka pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan

adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Keempat faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mengemukakan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1.1 *Bagan Kerangka Pemikiran*

1.7 Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

- a. Implementasi adalah suatu pelaksanaan dan penerapan sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu tersebut dilakukan agar timbul dampak berupa undang-undang peraturan pemerintah, keputusan pengadilan serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam kehidupan bernegara.
- b. Kebijakan adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka merumuskan artikulasi kepentingan seluruh stakeholder dalam rangka menyelesaikan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Kebijakan public kerap pula menyertakan partisipasi masyarakat guna menghasilkan keputusan yang terbaik.
- c. Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

- d. Model implementasi kebijakan yang berperspektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edwards III menanamkan model implementasi kebijakan publik dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*, terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi.
- e. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah salah satu upaya strategis dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Perkotaan.

1.7.2 Operasional Konsep Penelitian

Operasional konsep peneliti dilakukan dengan cara menjabarkan konsep- konsep variabel penelitian kedalam beberapa dimensi yang sesuai dengan teori yang digunakan, dimensi tersebut kemudian dijabarkan menjadi indikator- indikator. Untuk memudahkan dalam menganalisis data maka aspek kajian penelitian dioperasionalisasikan dalam parameter dan indikator seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Operasionalisasi Konsep Penelitian

Konsep Penelitian	Dimensi	Parameter
Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III dalam Leo Agustino (2020:154)	Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	Sumberdaya	1. Sumber Daya Manusia (Staff) 2. Sarana dan Prasarana 3. Dana
	Disposisi	1. Komitmen 2. Kompetensi
	Struktur Birokrasi	1. Standard Operational Procedures (SOP) 2. Fragmentasi

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian yang digunakan

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, sedangkan prosedur penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan

dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian, metode penelitian melingkupi prosedur penelitian dan teknik penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menggunakan penekanan pada proses dan makna yang diuji atau diukur dengan setepat-tepatnya berupa data deskriptif. Metode Lincoln dalam Moleong (2010 : 5) menyatakan bahwa :

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada. Dalam penelitian kuantitatif metode yang digunakan adalah wawancara, pengamatan, penafsiran dokumen. Dengan kata lain penelitian yang tidak mengadakan perhitungan”

Alasan penulis memilih metode penelitian kualitatif adalah karena penelitian yang dilakukan bukan untuk mencari hubungan antar variabel pada obyek yang diteliti bersifat interaktif yaitu saling mempengaruhi, akan tetapi penelitian dilakukan untuk menggali, menemukan, menjelaskan dan memaparkan tentang “Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Cirebon” .

1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Menurut Moleong (2010 : 12)

“Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Seorang informan dapat memberikan informasi yang berupa pertanyaan, kata-kata, pendapat, atau pandangan mengenai objek penelitian.”

Pemilihan informan dapat dilakukan dengan beberapa teknik yaitu:

1. Teknik purposive (purposive sampling). Dalam teknik ini peneliti memilih dan menetapkan secara sengaja beberapa informan yang dinilai berkompeten yaitu yang benar-benar memahami masalah yang diteliti.
2. Teknik bola salju (snowball sampling). Dalam teknik ini pertama-tama peneliti mewawancarai satu orang informan. Kemudian informan ini merekomendasikan agar peneliti mewawancarai informan-informan lain. Informan-informan lain ini kemudian juga merekomendasikan agar peneliti mewawancarai informan-informan lain lagi. Demikian seterusnya, sehingga semakin lama jumlah informan akan semakin banyak.

Teknik pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara Purposive Sampling artinya pengambilan sampel atau informan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu informan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Informan Kunci;
 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon
- b. Informan Pendukung
 1. Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon
 2. Masyarakat yang terdampak Program Kota Tanpa Kumuh

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka analisis penelitian. Berikut ini proses kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data, adapun proses yang dimaksud yaitu :

Sugiyono (2017:225) mengemukakan bahwa :

“Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), Wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.”

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis meliputi (Sugiyono, 2017: 226-240) :

1. Studi Kepustakaan

Penulisan mengumpulkan data-data dari sumber tertulis antara lain dengan mempelajari dan membaca buku-buku, dokumen-dokumen, internet, serta sumber-sumber lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan terbagi menjadi dua yaitu Observasi dan Wawancara, penjelasan mengenai observasi menurut young and Schmitt (1973) dalam Pasolong (2013:131) adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan sistematis berkaitan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang terjadi.

b. Wawancara

Wawancara dalam Pasolong (2013 : 137) merupakan :

“Kegiatan Tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara Secara Langsung, wawancara ini merupakan pembicaraan dua arah yang dilakukan oleh pewawancara (interview) terhadap responden atau informan, untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.”

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Harbani Pasolong 2013 : 70) :

1. Data primer yakni menggunakan metode wawancara kepada informan yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada yang berkepentingan.
2. Data sekunder, dilakukan dengan cara mencari data-data yang tersedia yang diperlukan oleh penulis sebagai referensi dan bahan acuan penelitian. Seperti bahan-bahan referensi, studi kepustakaan, melalui literatur-literatur yang dibutuhkan penulis.
3. Dokumentasi, dengan mengambil dokumen dalam bentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan dan dokumen dalam bentuk gambar/foto yang relevan dengan masalah yang diteliti.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

“Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Dalam hal reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan.” (Sugiyono, 2017: 267)

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan data yang diperoleh oleh peneliti. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan pengecekan keabsahan data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan cara *check*, *recheck*, dan *cross check* terhadap data tersebut. Adapun cara yang digunakan dalam triangulasi ini adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dan hasil wawancara dengan para informan.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling berkaitan.

Pengecekan data dilakukan memastikan bahwa data yang diperoleh adalah akurat dan valid, maka dilakukan validitas data dengan teknik triangulasi yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang sama pada informan yang berbeda terhadap data maupun informasi dari hasil wawancara.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif, yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. Kemudian data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan serta dibantu dengan keterangan tambahan yang dapat mendukung penelitian. Jadi penelitian ini menggambarkan bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Cirebon.

Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2017:246-252) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Yaitu pemilihan data yang telah diperoleh, dikumpulkan, kemudian dirinci secara sistematis dan memilih pokok-pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, sehingga diharapkan memberikan deskripsi dan analisis yang lebih tajam.

2. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data, Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat bersifat deskriptif, bagan, tabel, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.

3. Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

1.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.IV, Sukapura, Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45122. Pemilihan lokasi penelitian ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Adanya masalah yang harus dicari permasalahan dan solusinya.
2. Adanya data yang akan mendukung penelitian.
3. Lokasi penelitian yang mudah dijangkau peneliti.

1.9.2 Jadwal Penelitian

Berikut jadwal penelitian yang dilakukan oleh peneliti sehingga pembaca mengetahui kapan penelitian ini dimulai dan berakhir.

Tahap Akhir																			
1.	Seminar Draft Skripsi																		
2.	Seminar Skripsi																		



